

## STUDI TENTANG MODERNISME INDONESIA

Abdullah

Jurusan Aqidah dan filsafat

Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Alauddin

Alamat; BTN Pao-Pao Permai Blok C14/5 Gowa

HP.085253818724/ E-mail: [abdullahdul687@gmail.com](mailto:abdullahdul687@gmail.com)

### Abstrak

*Mengenai gerakan modernisasi pemikiran Islam di Indonesia telah berkembang secara evolusif sejak permulaan abad XX, ditandai oleh munculnya beberapa tokoh (KH. Ahmad Dahlan, KH. Jamil Djambek, Hamka, H. Abdullah Ahmad dan lain-lain), yang merupakan pengaruh modernisasi Ibnu Taimiyah, Muh. Bin Abdul Wahab, Jamaluddin al-Afgani, selanjutnya Muhammad Abduh di Timur Tengah.*

*Proses modernisasi pemikiran Islam itu, telah berkembang secara dinamis dan juga mempengaruhi munculnya para modernis Islam di permukaan yang lebih brillian, yang menginginkan agar umat Islam menginterpretasikan Islam sedapat mungkin secara rasional dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek teologi, filsafat dan tasawuf. Masalah wacana dan gerakan yang dikembangkan modernisasi pemikiran Islam Orde Baru oleh Harun dan Nurcholish adalah sebagai berikut: Wacana pemikirannya dalam melakukan modernisasi pemikiran Islam di Indonesia era Orde Baru adalah masalah rasionalisme, sekularisme, kebangsaan, pendidikan dan pluralisme dalam tinjauan Islam. Rasionalisasi Islam bagi Harun dan Nurcholish adalah suatu keharusan untuk memahami Islam secara mendalam sebagai agama rasional dan memiliki kebenaran yang absolut dan komprehensif.*

### I. Latar Belakang masalah

Gerakan modernisasi pemikiran Islam di Indonesia, pada awalnya merupakan kelanjutan dari “gerakan pemurnian” seperti yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), Abdul Karim Amrullah (1879-1945), dan Haji Abdullah Ahmad di Sumatera Barat. Kemudian pada tanggal 12 Nopember 1912, K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) mendirikan Muhammadiyah sebagai cikal-bakal pembaruan pendidikan di Indonesia, yang mendapat pengaruh dari ide-ide Muhammad Abduh (1849-1905) tentang kebutuhan reformasi (*need reformation*) dan modernisasi sistem pendidikan Islam. Organisasi Muhammadiyah ini juga mendapat pengaruh dari ide pembaruan Ibnu Taimiyah (w. 1728 H./1328 M.), Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab (1703-1787 M.) dan Jamal al-D<sup>3</sup>n Al-Afganiy (1839-1879 M.).

Relevansinya dengan organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam Indonesia, ada tiga faktor internal yang melatarbelakangi adanya spirit modernisasi pemikiran Islam dalam bentuk organisasi itu. *Pertama*, keterbelakangan dan rendahnya pendidikan umat Islam Indonesia pada seluruh aspek kehidupan. *Kedua*, kemiskinan serius dalam negara Indonesia, sebagai negara yang memiliki kekayaan alam. *Ketiga*, kondisi pendidikan Islam sudah ketinggalan, sebagaimana yang diwakili oleh sistem pendidikan di pesantren-pesantren.<sup>1</sup>

Mencermati perkembangan gerakan modernisasi pemikiran Islam yang dilakukan oleh para puritanis dan modernis tersebut, maka sejak tahun 1968 atau 1967,

kalangan muda dalam gerakan Islam, cukup sibuk membahas tentang perlunya modernisasi. Bukti-buktinya dapat ditemukan pada tulisan-tulisan yang dimuat di koran-koran mahasiswa seperti: *Mahasiswa Indonesia, Mimbar Demokrasi, Gema Mahasiswa (terbitan dewan mahasiswa UGM), Harian KAMI, Harian Masa Kini*<sup>2</sup>. Di lingkungan HMI, masalah modernisasi merupakan sentral pembahasan dalam latihan kader, bahkan di kompreksi-kompreksi cabang di berbagai kota yang ada universitasnya.

## II. Pembahasan

### A. Modernisasi menuju Rasionalisasi ajaran Islam,

Kata *modernisme* sebagai istilah kunci dalam studi ini memiliki arti yang secara harfiah bermakna "baru". Istilah ini populer atau sering disebut dengan istilah *modern time* (zaman baru) atau *characteristic of the present or the recent time* (ciri dari zaman sekarang atau zaman kini).

Menurut Mohammed Arkuon istilah modernisasi itu berasal dari kata *modernus* (bahasa Latin) yang pertama kali dipakai oleh kalangan Kristen sekitar pada tahun 490 M (filsafat Helenik dan Romawi) –yang menunjukkan adanya perpindahan dari masa Romawi lama ke periode Masehi<sup>3</sup>. Sedangkan *modernization* bermakna pembaharuan, selanjutnya kata *modernisme (modernism) is modern views or methods especially tendency in matters or religious belief to subordinate tradition to harmony with modern thought*.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa term yang berkaitan dengan modern di atas, maka modernisasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang kontemporer atau mengikuti zaman dan menaklukan alam semesta (dari pemahaman kosmosentris- antroposentris). Maksudnya bahwa modern adalah sesuatu yang terpisah dari yang transenden dan dari prinsip-prinsip langgeng yang dalam realitas mengatur materi dan diberitakan kepada manusia melalui wahyu dalam pengertian yang paling universal. Jika modernisme tersebut dipertentangkan dengan agama (tradisi), maka akan cenderung kepada persoalan yang menyangkut aspek manusiawi semata-mata dan semakin terpisah dari sumber Yang Ilahi.

Pengertian umum yang berkembang tentang modernisme menurut Akbar S. Ahmed telah diterjemahkan oleh sebagian pemimpin muslim seperti; *pertama*, apabila dipandang sebagai historis, maka modern dapat dipahami sebagai kondisi dan keadaan setelah tradisionalisme atau pasca puritanisme. Dengan demikian modernisasi dipandang dengan kacamata historis telah mengalami perubahan atau proses akhir yang akan diganti dengan *era* berikutnya yaitu *post modernisme*. Pada periode modern itu kata Akbar, telah menggiring sebagian kaum muslim (tradisionalis) ke jalan buntu, karakteristiknya bersifat diktator, kudeta, korupsi dan nepotisme dalam politik; standar pendidikan yang rendah, parasit intelektual; penindasan terus menerus terhadap wanita (diskriminasi sosial) dan distribusi kekayaan yang tidak adil.<sup>5</sup> *Kedua*, modernisme dipandang sebagai gerakan intelektual yang berusaha menggugat, bahkan merekonstruksi pemikiran keagamaan sebelumnya, yang berkembang dalam bingkai paradigma tradisional dan puritanistik. Modern sebagai gerakan di sini, dapat dipahami sebagai motivasi yang menguasai pendidikan, teknologi dan industrialisasi Barat<sup>6</sup>, termasuk ide-ide tentang demokrasi representatif untuk didiskusikan bahkan dapat direalisasikan.

Perkembangan modernitas baik dalam pengertian maupun sejarah perkembangannya yang telah disebutkan di atas, jika ditelusuri secara historis hirarkis,

memiliki kaitan dengan kemajuan pada masa lalu: zaman kuno (Yunani-Romawi) dan era abad pertengahan (yang bertepatan dengan zaman keemasan Islam di Timur dekat). Karena itu, modernitas tidak terlepas dari kemajuan yang pernah ada di lingkungan Yunani Semit. Antara abad ke- 7-12 terjadi kemajuan pesat di dunia Islam yang tidak terlepas dari pengaruh Yunani melalui gelombang Helenisme. Kemajuan tersebut kemudian “pindah” ke tangan dunia Kristen pada abad ke-12 hingga abad ke-15 (kejayaan skolastik) dengan pemikirnya seperti Albertus Agung, Thomas Aquinas, St. Agustinus, Anselmus, Bonventura dan sebagainya, yang ciri khasnya bersifat *teosentris* dan terjadi *sinkritisisme* agama dengan filsafat<sup>7</sup>.

Memperhatikan perkembangan modernitas di Barat pasca abad pertengahan, dalam wujud ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, menyebabkan munculnya sikap mempertuhankan apa yang dipikirkan dan apa yang ditemukannya, sehingga muncul gerakan-gerakan humanisme, saintisme, antroposentrisme yang mempertentangkan secara simplistis antara Islam yang identik dengan kemunduran, tradisi, kekolotan dengan modernitas Barat yang identik dengan kemajuan, inovasi dan dinamika.

Perkembangan modernisasi yang bergerak dari arah Eropa memicu juga perkembangan modernisasi dalam Islam sebagaimana yang disaksikan pada pentas sejarah seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di Barat telah membuat sebagian kalangan umat Islam terkagum-kagum dan mengalami shock culture. Untuk mengapresiasi kemajuan Barat itu, sejumlah tokoh Islam menganjurkan dan menyerukan adanya pembaharuan Islam dengan mencontoh Barat.

Pembaharuan pemikiran di dunia Islam dimulai ketika Khilafah ‘Utsmaniyah di Turki diambang kehancuran. Selanjutnya, Islam Turki di bawah komando Mustafa al-Tatruk didekonstruksi sedemikian rupa seperti Barat. Setelah berhasil mendelegitimasi kewenangan khalifah dan Pengadilan Khusus Agama (Islam), al-Tatruk dengan penuh kepongahan merombak total tatanan prinsip-prinsip Islam.

Tidak hanya itu. Ia juga mengganti Hukum Syari’at tentang perkawinan Islam dengan diganti hukum Swiss, di mana perempuan punya hak cerai sama dengan laki-laki. Selanjutnya, sekolah-sekolah agama (madrasah) dan perguruan tinggi agama dibubarkan, dan diganti dengan sekolah ala Barat.

Perubahan yang lebih parah lagi adalah adzan bahasa Arab diganti dengan bahasa lokal (Turki), jilbab dilarang, dan penggunaan bahasa Arab pun diganti dengan bahasa Barat. Pendek kata, semua identitas, idiom-idiom keIslaman dan keArabian dihapuskan diganti dengan simbol, identitas dan tradisi Barat. Setelah itu semua, sempurnalah bekas khilafah ‘Utsmaniyah itu menjadi Republik Turki yang sekular.

Selain Turki, dunia Islam yang kecipratan dengan pembaharuan Islam adalah Mesir. Pembaharuan di negeri Kinanah ini mulai terjadi ketika utusan Perancis Napoleon Bonaparte dan sejumlah ilmuwan yang ikut rombongannya datang ke negeri itu. Dari situ terjadilah kontak masyarakat Mesir dengan budaya Barat.

Seperti yang dialami Turki, sebagian ulama Mesir mendukung program pembaharuan model Barat itu. Untuk kepentingan ini, maka diutuslah pelajar-pelajar Mesir untuk belajar di Paris dengan pengawasan imam. Adalah Rifa’ al-Thahthawi (1803-1873) dari imam-imam yang diutus untuk belajar ke sana. Sekembalinya dari pengembaraan dari negeri Barat,

Secara umum beberapa karakteristik modernisme yang dimaksud dalam kajian ini adalah; *Pertama*, Antropomorfisme, manusia mendapat atau menghasilkan sains

mengesampingkan realitas manusia dari gambaran umum semesta. Kriteria ini semata-mata murni manusiawi, akal dan indera manusialah yang menentukan warna sains modern. *Kedua*, yang erat kaitannya dengan antropomorfisme adalah tidak adanya prinsip-prinsip yang menjadi ciri dari modern untuk dapat berprinsip bagi sesuatu, sifat manusia terlampaui tidak mantap, berubah dan bergejolak. *Ketiga*, tidak adanya kepekaan terhadap yang sakral. Manusia modern secara praktis adalah manusia yang kehilangan kepekaan, pemikirannya memperlihatkan secara mencolok tiadanya kepekaan terhadap yang sakral.<sup>8</sup>

Dengan demikian perkembangan modernisasi Barat selalu mendapat pertentangan psikologis bahkan sosiologis, karena Islam menuduh Barat sangat etnosentris dan sebagainya. Di antara suara apologetis dialektis ada pendapat yang mengatakan, bahwa sains dan teknologi Barat sejak abad ke -16 (pasca renaissance) pada dasarnya bertitik tolak dari zaman keemasan (*Golden Age*) ilmu pengetahuan Arab. Bahkan juga dikatakan bahwa revolusi sosial serta benih-benih demokrasi telah *real* atau setidaknya tidaknya tersirat dalam Alquran dan Hadis.

Salah satu tantangan bangsa muslim dalam upaya mendorong modernisasi adalah membebaskan diri dari suasana psikologis masa lalu, yang mengatakan bahwa Timur itu sufistik, pesimistik (berpaham teologi Jabariah), sementara Barat itu saintifik dan rasionalis. Atas dasar itu, muncul inisiatif dari para pemikir Timur diwakili oleh Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh yang dianggap sebagai modernis.<sup>9</sup>

Adapun upaya memotivasi guna menguasai pendidikan Barat<sup>10</sup> - yang harus dilakukan umat Islam modern sebagai *problem solving* - keterbelakangan Islam dari sisi sains, yang juga kebetulan memiliki kesamaan pandangan dengannya dalam beberapa aspek dapat diringkas; *Pertama*, Umat Islam butuh sebuah sistem sains yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, material maupun spiritual. Namun sistem sains Barat tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, karena ia mengandung nilai-nilai khas Barat yang banyak bertentangan dengan citra Islam. Secara aksiologis hal itu telah terbukti menimbulkan ancaman-ancaman bagi keberlangsungan kehidupan umat Islam di muka bumi. *Kedua*, Secara sosiologis umat Islam yang tinggal di wilayah geografis dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari Barat - tempat sains modern dikembangkan. *Ketiga*, Umat Islam pernah memiliki peradaban Islami di mana sains berkembang harmonis dengan kebutuhan fitrawi umat Islam.<sup>11</sup>

Kecenderungan umat Islam, khususnya para pemikir Islam menyeruh untuk segera memasuki dan menciptakan sebuah sains dan peradaban Islam sebagaimana yang dikuasai oleh Barat, karena - kata Ziaduddin Sardar, bahwa kesalehan pribadi para pemikir Islam itu membuat hasil kerja profesional mereka sebagai ilmuwan relevan dengan Islam dan sosial kemasyarakatannya. Berbeda dengan Naquib Alatas, ia melihat bahwa bekerja dalam sistem pengetahuan Barat, ilmuwan muslim hanya mempromosikan nilai dan ketegangan-ketegangan kultural Barat, sehingga menyebabkan dualisme pendidikan Islam (ilmu agama dan ilmu sekuler)<sup>12</sup>

Mengenai masalah modernisme secara khusus dalam istilah Islam, diintrodusir oleh beberapa orang tokoh gerakan pembaharuan Islam asal Mesir, Muhammad Abduh, dan Fazlur Rahman (1919-1988). Mereka membagi dialektik perkembangan pembaharuan di dunia Islam ke dalam beberapa gerakan, *Pertama*, Revivalisme Pramodernis, muncul sekitar abad 18-19 di Arabia (Muhammad Abduh W-1792), India (Ahmad Khan 1819 - 1898) dan Afrika, yang ciri-ciri umumnya. (1). Keprihatinan degradasi moral umat Islam baik dalam agama maupun pendidikan. (2) Seruan

kembali pada Islam orisinal (puritanis). (3) Seruan mengenyahkan corak predeterminis. (4) Rekomendasi perlunya penggunaan kekuatan senjata bila mendesak (Fundamentalisme). *Kedua*, Modernisme klasik (pertengahan abad ke-19 atau awal abad ke-20) di bawah pengaruh ide-ide Barat. Pada saat ini muncul seruan bahwa pintu ijtihad terbuka, adanya hubungan akal dengan wahyu (Muh Abduh), serta modernisme sosial, emansipasi wanita (Qasim Amin), modernisme politik (Ali Abdul Raziq) ikut menandai bangkitnya modernisasi Islam. *Ketiga*, Revivalisme pasca modernis atau Neo-Fundamentalisme. Kelompok ini tidak melanjutkan api modernisme klasik – mereka ini selalu membedakan Islam dengan Barat. *Keempat*, Neo-modernis merupakan gerakan sintesa yang hendak melawan revivalis dan menutup kekurangan modern klasik.<sup>13</sup>

Para modernis sebagai figur modernisasi Islam yang paling awal adalah Sayyid Ahmad Khan (1817–1989), mendirikan MAOC (The Muhammadan Anglo-Oriental College) sebagai tandingan oxbridge dalam gaya dan organisasinya yang serba modern. Dengan adanya modernisasi itu memberi senjata ampuh bagi muslim seperti Sir Sayyid Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Selanjutnya Muhammad Abduh dalam modernismenya di Arab bersama muridnya Rasyid Ridha adalah modernis yang paling berpengaruh.<sup>14</sup> Keduanya mendapat inspirasi dari tokoh terakhir abad ke-19, Jamaluddin al-Afgani. Interaksi dan integritas intelektual Afgani, menaruh perhatian besar pada metodologi pemikiran Barat di satu sisi, dan pan-Islamismenya di lain pihak, menjadikan dirinya sebagai modernis muslim. Selain itu, kelompok modernis muslim juga muncul di Turki, antara lain: Kemal al-Taturk, al-Jinnah di Pakistan, dan kelompok modernis muslim yang tergabung dalam pergerakan Ihwan al-Muslimun yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir.

Fenomena modernisme Islam di Indonesia mulai terlihat pada tahun 1970-an yang dimotori oleh generasi muda terpelajar. Umumnya mereka berpendidikan modern, namun pasti mereka adalah generasi yang sudah matang pemikirannya dan dibesarkan oleh berbagai *experience*-nya. Mereka terdiri dari kaum cerdas yang memiliki pemikiran brilian dan selalu memicu kontroversi<sup>15</sup> dari berbagai kalangan yang berpikir dalam corak puritan, fundamental atau umumnya tradisional.

Beberapa tokoh yang termasuk dalam tipologi ini diantaranya, adalah Harun Nasution, Mukti Ali, Nurcholish Madjid, Djohn Efendi, Ahmad Wahib, Muh. Natsir dan lain-lain. Tampilnya tokoh tersebut, dinilai banyak kalangan sebagai pembawa angin segar, wacana filosofis bagi pembaruan Islam di Indonesia, sekaligus telah menutupi sebagian besar segi kelemahan pola pikir para pembaharu sebelumnya yang sangat (tradisional, fundamentalisme, primordialisme yang umumnya sangat tekstual).

Dari konteks pertumbuhan tokoh modernis itu, dapat diketahui secara historis obyektif, sejak awal abad ke 20 Indonesia marak dengan gerakan modernisme. Meskipun tidak terlepas dari usaha-usaha positif yang berhasil dilakukannya. Perkembangan ini kurang mengakar pada khazanah intelektualisme Islam. Gerakan ini dapat dianggap gagal mempertahankan kesegaran pemikiran modernisasinya. Selanjutnya yang dapat disaksikan hanyalah kontinuitas kerja dalam mengolah lembaga-lembaga modernisasi secara amal praktikal. Disamping itu, kecenderungan untuk menentukan berbagai gaya tradisional terkesan tidak tegas, karena cenderung menampilkan eksistensi diri secara psikologis dalam keadaan kaku. Sedangkan kelompok tradisional yang cenderung mempertahankan apa yang sudah ada dianggap sebagai yang terbaik, sehingga ketika mereka menghadapi perubahan, mereka tetap

memfilter bahkan mereduksi makna pembaruan. Tindakan tersebut membuat kaum tradisional Islam lambat dalam berkembang.

Pemikiran modernisme, menurut Budhy Munawar Rachman dapat ditepologikan menjadi tiga, yang masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. *Pertama, Islam Rasional*: Penelitian Keislaman kalangan ini dilaksanakan guna memenuhi peranan menetapkan opini universal, menghilangkan kesangsian dan akhirnya kepercayaan tentang Islam yang kokoh. Sesuatu yang dicari dalam kajian Islam rasional adalah ditemukannya pengetahuan (kognisi) mendasar mengenai Islam yang sebenarnya (Islam rasional, untuk mendapatkan keyakinan yang rasional dari nilai afektif, yang dipertanggungjawabkan secara rasional epistemologis. Tokoh yang masuk di sini adalah Harun Nasution dan John Efendi. *Kedua, Islam peradaban* yang kepentingannya adalah praktis untuk mendapatkan makna dari manifestasi konkrit Alquran. Karena itu, disamping analisis kebahasaan dari konsep-konsep kunci Alquran, mereka pun memberi perhatian pada Islam kaum salaf. Kalangan ini mencoba mentransformasikan pengertian yang didapat dari sejarah Islam ke dalam sejarah sosial dewasa ini. Kategori dalam tokoh peradaban ini adalah Nurcholish Madjid dan Kuntowijoyo. *Ketiga, Islam transformatif* yang berpijak pada kata kunci ‘emansipatoris’, tokoh-tokohnya dilatarbelakangi oleh ilmu sosial radikal. Misi pokok yang diemban adalah berupaya membebaskan masyarakat muslim yang miskin, terbelakang (pengetahuan) dan tertindas baik dalam bentuk fisik maupun moral. Akhir-akhir ini pelopor yang dapat dikategorikan dalam Islam transformatif adalah M. Dawam Raharjo dan Adi Sasono.<sup>16</sup>

Ketiga tipologi pemikiran modernisme Islam Indonesia di atas, hanya Islam rasional dan Islam peradaban yang tampak pada masa Orde Baru. Alasannya, karena dari beberapa pelopor dalam memoderanisasi Islam yang disebutkan itu, terbukti tampilnya modernis ternama yaitu Harun Nasution (meskipun tidak disebutkan oleh Budi Munawar Rachman) dan Nurcholish Madjid yang sempat menggegerkan para intelektual lainnya. Titik nadi pemikiran masing-masing adalah tentang gerakan modernisme dalam Islam rasional dan Islam peradaban, terutama dalam isu sekularisasi dalam Islam. Sedangkan Islam transformatif yang dilancarkan atau dipelopori oleh Adi Sasono dan Dawam Raharjo, termasuk dalam tepologi Neo-modernis Islam.<sup>17</sup> Alasannya, kedua tokoh tersebut belum terlalu populer pada era Orde Baru dari aspek gagasannya (belum ada yang brilliant), maksudnya belum ada yang istimewa bila dibandingkan dengan kedua tokoh yang sementara dikaji ini.

Para modernis yang dikaji di sini merupakan orang atau tokoh yang dapat mewakili tipologi pemikiran Islam kontemporer. Hal ini pernah dibahas oleh William Liddle. Ia mengemukakan bahwa ada 3 corak pemikiran Islam di Indonesia. *Pertama, Indigenist*, yaitu kelompok pemikir yang percaya bahwa Islam bersifat universal. Namun dalam realitasnya Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks kultur setempat. Gagasan tentang upaya kontekstualisasi doktrin Islam misalnya adalah usaha para intelektual muslim untuk mempertemukan Islam dengan kultur lokal. Mereka ini selalu memparalelkan dan mengharmonisasikan Islam dengan visi kebangsaan serta kenegaraan secara obyektif dan proporsional. *Kedua, sosial reformis*, yaitu gerakan pemikiran yang cenderung menekankan pada aksi guna mengatasi berbagai ketimpangan sosial, penindasan masyarakat kelas bawah. Kelompok sosial reformis ini banyak bergabung dengan LSM-LSM. Mereka senantiasa lebih agresif mencari solusi yang dapat dijadikan model pembangunan yang tepat demi terwujudnya *civil-society*.

*Ketiga*, universalisme, yaitu kelompok pemikir yang percaya bahwa Al-Qur'an dan Hadis sudah sangat lengkap dan dapat langsung diterapkan pada masyarakat Islam seperti zaman Rasul. Basis kelompok ini berada di sejumlah kampus di berbagai kota.<sup>18</sup>

Dari ketiga corak pemikiran Islam di Indonesia yang dikemukakan William Liddle tersebut, dapat dipahami bahwa corak pemikiran indegenist, sosial reformis dan universalisme terdapat pada pemikiran Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Jika diamati secara serius, bukan saja Harun dan Nurcholish yang memenuhi kriteria tersebut. Tetapi masih banyak pemikir Islam lainnya di Indonesia seperti : Muhammad Natsir, Deliar Noer, H.M. Rasjidi bahkan dari kalangan non muslim seperti Frans Magnis Suseno, Victor I. Tanja.

Para pemikir yang termasuk dalam corak pemikiran Islam yang indegenist dan universalisme itu, dapat pula disebut sebagai pemikir yang inklusif dan memiliki pemikiran yang sangat pluralistis. Alasannya bahwa pemikir Islam yang telah mencapai titik universalisme dan pluralisme, maka dari faham kemajemukan masyarakatnya dapat menerima akan realitas masyarakat itu. Pluralisme di sini dapat dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*).<sup>19</sup>

Corak pemikiran Islam di Indonesia yang universalisme adalah para pemikir Islam yang tidak hanya sekedar memahami Islam sebagai agama universal, inklusif, pluralis yang dipandang sebagai fragmentasi dari penggambaran idealis tentang keanekaan umat manusia dari suku, agama, untuk disatukan tetapi para pemikir itu betul-betul memahami universalisme, inklusif dan pluralisme dengan sejati.

Studi tentang modernisme Islam Indonesia dalam fokus lain, dilakukan M. Deden Ridwan. Ia menunjuk adanya peran pers yang cukup dominan dalam mensosialisasikan gagasan modernisme, dalam hal mengkaji peran majalah *Tempo* yang selalu merealisasikan pikiran Nurcholish Madjid tokoh sentral modernis. Dan bahkan ada anggapan bahwa Nurcholish Madjid bukan saja pemikir modernisme, tetapi lebih dari itu (Neo-Moderisme). Majalah *Tempo* menurunkan laporan utamanya tentang Nurcholish Madjid pada edisi Mei 1971, April 1972, Juli 1972, Desember 1973, Januari 1973, Juni 1986 dan April 1993.

Penelitian tersebut menggambarkan bahwa pemberitaan *Tempo* tentang gagasan pembaruan Nurcholish bukan semata-mata didasarkan pada tuntutan *Newsfact*, tetapi lebih mendasar pada visi penerbitan sendiri. Dalam pada itu, Deden Ridwan menyimpulkan bahwa pers dalam peta pemikiran Indonesia, telah merefleksikan model gerakan intelektual. Jadi *Tempo* sebagai pers dengan visi modernisme, bahkan sebagai visi neo-modernisme telah turut berpartisipasi merefleksikan pemikiran Nurcholish Madjid.

Dengan tumbuh suburnya peranan pers dalam merefleksikan gerakan intelektual, berarti ikut memicu pertumbuhan cendekiawan muslim di Indonesia. Goenawan Moehammad ketika mengupas perkembangan dan pertumbuhan cendekiawan muslim di Indonesia, antara lain ia berkata: Jika ada yang layak mendapat perhatian dari dunia intelektual Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, maka itu datang dari kaum cendekiawan Islam.<sup>20</sup>

Pengamatan Gunawan tersebut tidak meleset, demikianlah terdapat pada tahun terakhir ini, cendekiawan muslim tampil serius sebagai individu maupun kelompok yang merebut banyak perhatian. Jendral Wijoyo Suyono dalam kedudukannya selaku Kas Kopkamtib berceramah didepan korps alumni HMI

(Kahmi) Jakarta Raya tanggal 15 Agustus 1982 yang berjudul "Peranan Cendekiawan Muslim dalam Bidang Pertahanan Keamanan Nasional". Ceramah tersebut banyak mengundang respon masyarakat banyak. Majalah Fokus dalam penerbitannya tanggal 3 September 1982 mengangkat fenomena munculnya cendekiawan muslim sebagai laporan utama.<sup>21</sup> Sejumlah buku, risalah, polemik, artikel esei, wawancara diterbitkan orang yang memuat kandungan pikiran-pikiran cendekiawan muslim. Bahkan dalam sebuah pertemuan yang diresmikan pemerintah yang diberi label: "Pertemuan-pertemuan Cendekiawan Muslim Pertama" diadakan pada tanggal 26-28 Desember 1984. Pertemuan yang bertema "Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa" dihadiri oleh 165 cendekiawan muslim dari berbagai pelosok tanah air<sup>22</sup>

Cikal bakal pertumbuhan cendekiawan muslim Indonesia itu, pada dasarnya berawal dari pertemuan para sarjana muslim di Megamendeng tahun 1964 yang menghasilkan berdirinya persamaan dengan ketuanya yang pertama Subchan ZE. Dari pertumbuhan cendekiawan muslim inilah merupakan hembusan angin segar modernisme mulai bangkit. Perkembangan selanjutnya dapat berkembang melalui jalur politisi, partai politik dan sosial lainnya.

Cendekiawan muslim yang merupakan bagian dari modernisme Islam di Indonesia telah bangkit secara evolusif, dan tampil rasional dengan penuh kearifan. Cendekiawan atau modernis seperti itu, pertengahan abad Orde Baru tidak lagi terbatas pada pemikiran keislaman yang teosofis, eksklusif. Tetapi lebih cenderung pada ideologi keagamaan dengan tema pemikiran yang inklusivistik, serta merambah pada bidang-bidang kehidupan sosial yang lebih komprehensif dan menekankan dimensi praktisnya, yaitu iman, ilmu dan amal.

Tidak berlebihan ketika Azyumardi Azra menyebutkan modernisme-neomodernisme Islam cukup prospektif. Alasannya, karena tema-tema dan inklusifisme secara signifikan akan manandai perkembangan masyarakat ke depan. Idiologi keagamaan modernisme menemukan landasan yang kuat pada pemikiran klasik. Islam yang dipadukan dengan analisis tentang perkembangan sosio kultural masyarakat bahkan kristisme yang tajam terhadap Barat. Azra Kemudian memberikan catatan khusus, bahwa kaum modernis kini dituntut untuk tidak hanya melakukan evaluasi secara lebih jujur terhadap paradigma pemikiran yang dikembangkannya, tetapi juga mereka diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan umat.<sup>23</sup>

Setelah melacak perkembangan modernisme Islam di Indonesia yang dilancarkan cendekiawan muslim sebagaimana disebutkan di atas, akan dikemukakan pula studi modernisme Indonesia, khususnya terhadap kedua tokoh sentral dalam kajian ini.

Harun Nasution setiba di tanah air pada tahun 1969, langsung mencelupkan diri dalam bidang akademis dengan menjadi dosen pada IAIN Jakarta, IKIP Jakarta dan kemudian pada universitas nasional. Bukti gerakan modernisasi ini, Harun melancarkannya melalui jalur akademik merangkap dengan administrasi, sebagaimana pengalamannya ketika memimpin IAIN, Ketua lembaga pembinaan pendidikan agama IKIP Jakarta dan terakhir pimpinan Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta. Sedangkan Nurcholish Madjid terlibat dalam modernisme di Indonesia era Orde Baru, sejak tahun 1970 dalam isu sekularisasi, rasionalisasi Islam. Bahkan hingga sekarang memimpin sebuah universitas ternama, yaitu Universitas Paramadina Mulya. Universitas ini merupakan wadah pengembangan kajian keagamaan dan

keilmuan menuju tatanan masyarakat yang demokratis dari kehidupan masyarakat yang plural.

Keunikan Harun Nasution dibandingkan dengan tokoh modernis sebelumnya terletak pada sistem perolehan pengetahuan Islamnya. Harun, menurut pengakuannya, mempelajari Islam mulai dari lembaga-lembaga pendidikan Barat. Sebelumnya, di masa mudanya, ia belajar di Modern Islamietische Kweek School (Sekolah Guru Menengah Islam Bukittinggi), di Masjid Haram Mekkah dan di Universitas al-Azhar, pernah kuliah di Ma'had al-Dirasah, al-Islamiyah (Institut Studi Islam) di Kairo, dan sampai tingkat doktornya mengkaji Islam secara kontinyu. Sedangkan modernis Islam Indonesia sebelumnya, lebih banyak belajar sendiri (otodidat), misalnya para modernis dari Minangkabau (H. Abdul Karim Amrullah<sup>24</sup> Syekh Jamil Djambek), dari Jawa Kyai Haji Ahmad Dahlan<sup>25</sup>, Muhammad Natsir<sup>26</sup>. Mereka ini betul-betul banyak belajar di Mekkah, tetapi kesadarannya tentang pembaharuan timbul setelah mereka mengikuti buah pikiran Muhammad Abduh dengan membaca sendiri, tanpa jalur akademik formal.

Di antara tokoh modernis yang disebutkan di atas, selain Harun dan Nurcholish Madjid, tidak seorang pun yang mempunyai perhatian pada Islam secara akademis. Mereka terlibat dalam gerakan di Minangkabau tanpa organisasi yang jelas (terkadang Muhammadiyah, Thawalib, tetapi juga secara individu, walaupun tak terlepas dari gerakan formal), KH. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah, Muhammad Salim dengan Serikat Islam, dan Muhammad Natsir dengan Persatuan Islam, kemudian Partai Islam Indonesia, lagi pula tentang sistem dialog yang semata-mata ilmiah belum dikenal amat waktu itu.<sup>27</sup>

Jauh sebelumnya perkembangan intelektualisme Islam dalam berbagai aspek modernisasinya, pada era Orde Baru berkembang pesat, terutama dalam pemikiran politik Islam. Meskipun demikian, perkembangan pemikiran politik Islam itu sama sekali berada di luar aktivitas politik kepartaian.

Aktivitas dan pemikiran politik yang dimaksud adalah mencerminkan pemikiran yang berasal dari pengamatan yang tajam dan penghayatan yang dalam tentang masyarakatnya. Di situlah terletak kekuatan mereka, sehingga berhasil melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot dan orisinal<sup>28</sup>. Aktivis politik Islam sekaligus pemikir yang memimpin wacana, Mohammad Natsir misalnya, dikenal dengan karyanya yang sangat visioner terkumpul dalam dua kapita selekta (1954), *Islam Sebagai Dasar Negara* (1957), *Islam Sebagai Ideologi* (1951). *Some Observations Concerning the Role of Islam in National and International Affairs* (1954). HOS Tjokroaminoto menulis *Islam dan Sosialisme*, (1950). Syafruddin Prawiranegara menulis *Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam, dan lain-lain*.<sup>29</sup>

Perkembangan modernisasi pemikiran Islam di era Orde Baru, yang dilakukan oleh para modernis Indonesia baik melalui peran aktivitas dalam kepartaian (Ahmad Dahlan, Jamil Djambek, Muh. Natsir, Ahmad Wahib dan lain-lain) maupun pemikiran politik Islam serta yang melakukan pembaharuan (Harun dan Nurcholish) melalui jalur akademik, baik masalah politik, teologi atau sosial keagamaan telah berkembang secara evolusioner dengan visi dan misi mereka masing-masing. Singkatnya, bahwa pada masa Orde Baru, wacana pemikiran politik memang pernah berkembang secara pesat, tetapi pernah juga mengalami kevakuman, namun (kasus politik Islam), terjadi hanya dalam konteks parpol. Di luar parpol, dinamika politik tetap berkembang secara signifikan sesuai dengan derasnya intelektualisme baru Islam.

Derasnya modernisasi pemikiran dalam Islam, bukan hanya sekedar *academic exercise*, melainkan memperlihatkan berkembangnya transformasi pemikiran dan praktik partai politik Islam di Indonesia ini. Goenawan Muhammad menggambarkan transformasi ideologi yang sangat signifikan, diawali oleh, sekedar menyebut beberapa tonggak perkembangan pemikiran yang penting -Nurcholish Madjid melalui gagasan *Islam yes partai Islam no*, diikuti oleh Munawir Sjadzali dengan pamfletnya, *Aspiransi Umat Islam Terpenuhi Tanpa Partai Islam* (1992), dan dikembangkan dengan canggih oleh Kuntowijoyo dengan ide lainnya, "*Obyektivikasi Islam*" (1997), termasuk sederet nama lainnya. Pemikiran politik Islam melaju dan mengalami transformasi secara signifikan. Agenda utama gerakan pemikiran ini bukan sekedar merevisi landasan teologis dan rumusan ideologisasi politik Islam, tetapi juga *recount* pendekatan dan strategis pencapaian cita-cita politik Islam itu sendiri.<sup>30</sup>

Modernisasi pemikiran politik di era Orde Baru pada dasarnya telah berlangsung bukan saja di kalangan parpol "Islam", melainkan juga di luar struktur parpol. Alasannya karena sejarah membuktikan bahwa munculnya tunas-tunas modernis di Indonesia sejak dekade 1965-an hingga 1980-an, kebanyakan berkembang dengan subur di luar struktur parpol, antara lain Harun Nasution dan Nurcholish Madjid.

### **B. Modernisasi Trend Kepada Liberalisasi Pemikiran Islam**

Pada hakikatnya manusia memiliki hak untuk mendapatkan dua jenis kebebasan, yaitu *Freedom to* (kebebasan untuk) dan *Freedom from* (kebebasan dari)<sup>31</sup>. Dalam konsep *freedom to* manusia mempunyai hak untuk bebas memilih apa yang dia mau seperti pekerjaan, jodoh, pendidikan, politik, agama, dll. Sementara konsep *freedom from* berarti individu mempunyai hak kebebasan dari kekerasan negara, kemiskinan, ketidakadilan, dll. Tapi jangan bayangkan kebebasan sama dengan keliaran, karena pada prinsipnya kebebasan individu seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Selain itu, dalam Liberalisme, kebebasan juga harus tunduk pada *rule of law*, sebagai sebuah konsensus yang disepakati bersama semua kalangan.

Belakangan ini ada kekacauan istilah mengenai salah satu sistem yang dianggap varian liberalisme yang sering kita dengar, yaitu "neoliberalisme." Dalam anggapan pengkritik, neoliberal sebagai bagian dari liberalisme merupakan sistem di mana intervensi negara hampir tidak ada, atau satu langkah lagi menuju anarki. Luthfi dengan tegas menolak neoliberalisme dikaitkan dengan liberalisme. "Neoliberalisme tidak pernah dikenal dalam tradisi liberalisme, istilah itu datang dari orang luar yang tidak suka dengan liberalisme," jelas Deputy Direktur Freedom Institute itu.<sup>32</sup>

Dalam tradisi liberal dikenal empat istilah yang biasa digunakan, yakni Liberalisme Klasik, Liberalisme Lama, Libertarianisme, dan Liberalisme Baru. Lalu di mana posisi Neoliberalisme yang sering dibicarakan itu? Jika yang mereka maksud Neoliberalisme adalah Liberalisme Baru, maka tuduhan mereka makin tak berdasar, karena prinsip-prinsip Liberalisme Baru sangat bertolak belakang dari Neoliberalisme. Liberalisme Baru adalah paham yang sama dengan Liberalisme Klasik (yang memperjuangkan kebebasan, *property rights*, dan hak individu), namun berbeda dalam hal kebijakan ekonomi, yang lebih menekankan adanya intervensi negara.

Selama ini ada beberapa orang yang menuduh bahwa Indonesia selalu dirugikan oleh liberalisme. Tapi fakta sejarah menunjukkan bahwa ketika Partai Liberal

berkuasa di Belanda pada abad ke-19, mereka menerapkan kebijakan politik etis yang memperbolehkan pribumi mengenyam pendidikan. Ujung dari politik etis ini tentu saja terwujudnya Indonesia merdeka yang dipelopori para cendekiawan nasional seperti Muhammad Hatta dan Syahrir. "Ini karena orang-orang liberal merasa bahwa ilmu pengetahuan harus disebarluaskan," tegas Luthfi. Jadi secara tidak langsung Indonesia pernah mendapat manfaat dari kebijakan liberal, meskipun dari penjajah.

Hampir semua negara sosialis dan komunis telah gagal menyejahterakan rakyatnya. Kini kita ditantang untuk mulai berani membuka diri dengan menerapkan nilai-nilai liberal dalam prinsip bernegara. Jika ada sebuah konsep yang selalu gagal jika diimplementasikan, kita bisa mengatakan bahwa kesalahan bukan lagi ada pada orang yang mengimplementasikannya, tapi jelas pada konsep itu sendiri.

Ke depan, Indonesia yang maju haruslah Indonesia yang bisa menghargai hak-hak individu warganya, menjunjung tinggi pluralisme, mau mengintegrasikan diri dengan perdagangan global, dan kuat dalam penegakan hukum.

Dr. Greg Barton, dalam disertasinya di Monash University, Australia, memberikan sejumlah program Islam Liberal di Indonesia, yaitu (1) pentingnya konstektualisasi ijtihad, (2) komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan, (3) penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama, (4) pemisahan agama dari partai politik dan adanya posisi non-sektarian negara.<sup>33</sup>

Dari disertasi Barton tersebut dapat diketahui bahwa memang ada strategi dan program yang sistematis dan metodologis dalam liberalisasi Islam di Indonesia. Penyebaran paham Pluralisme Agama--yang jelas-jelas merupakan paham syirik modern--dilakukan dengan cara yang sangat masif, melalui berbagai saluran, dan dukungan dana yang luar biasa. Dari program tersebut, ada tiga aspek liberalisasi Islam yang sedang gencar-gencarnya dilakukan di Indonesia.

Term liberal berasal dari bahasa Latin *liber* artinya bebas dan bukan budak atau suatu keadaan dimana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Makna bebas kemudian menjadi sebuah sikap kelas masyarakat terpelajar di Barat yang membuka pintu kebebasan berfikir (*The old Liberalism*). Sejumlah makna yang dilekatkan kepada liberalisme memberikan sebuah makna universal yakni kebebasan berfikir, inilah kata liberal berkembang sehingga mempunyai berbagai makna.

Secara politis liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat pada individu, dianggap sebagai memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk persamaan hak dihormati, hak berekspresi dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi<sup>34</sup>. Dalam konteks sosial liberalisme diartikan sebagai adalah suatu etika sosial yang membela kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*) secara umum<sup>35</sup>. Menurut Alonzo L. Hamby, PhD, Profesor Sejarah di Universitas Ohio, liberalisme adalah paham ekonomi dan politik yang menekankan pada kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan kesempatan (*opportunity*)<sup>36</sup>

Sejarah paham liberalisme ini berasal dari Yunani kuno, salah satu elemen terpenting peradaban Barat. Namun, perkembangan awalnya terjadi sekitar tahun 1215, ketika Raja John di Inggris mengeluarkan *Magna Charta*, dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan raja kepada bangsawan bawahan. Charta ini secara otomatis telah membatasi kekuasaan Raja John sendiri dan dianggap sebagai bentuk liberalisme awal (*early liberalism*).

Perkembangan liberalisme selanjutnya ditandai oleh revolusi tak berdarah yang terjadi pada tahun 1688 yang kemudian dikenal dengan sebutan *The Glorious*

*Revolution of 1688*. Revolusi ini berhasil menurunkan Raja James II dari England dan Ireland (James VII) dari Scotland) serta mengangkat William II dan Mary II sebagai raja. Setahun setelah revolusi ini, parlemen Inggris menyetujui sebuah undang-undang hak rakyat (*Bill of Right*) yang memuat penghapusan beberapa kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat Inggris. Pada saat bersamaan, seorang filosof Inggris, John Locke, mengajarkan bahwa setiap orang terlahir dengan hak-hak dasar (*natural right*) yang tidak boleh dirampas. Hak-hak dasar itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat opini, beragama, dan berbicara. Di dalam bukunya, *Two Treatises of Government* (1690), John Locke menyatakan, pemerintah memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar tersebut, dan jika ia tidak menjaga hak-hak dasar itu, rakyat memiliki hak untuk melakukan revolusi.

Singkatnya pada abad ke 20 setelah berakhirnya perang dunia pertama pada tahun 1918, beberapa negara Eropa menerapkan prinsip pemerintahan demokrasi. Hak kaum perempuan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di dalam pemerintahan diberikan. Menjelang tahun 1930-an, liberalisme mulai berkembang tidak hanya meliputi kebebasan berpolitik saja, tetapi juga mencakup kebebasan-kebebasan di bidang lainnya; misalnya ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tahun 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan empat kebebasan, yakni kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), dan kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*). Pada tahun 1948, PBB mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* yang menetapkan sejumlah hak ekonomi dan sosial, di samping hak politik.

Jika ditilik dari perkembangannya liberalisme secara umum memiliki dua aliran utama yang saling bersaing dalam menggunakan sebutan liberal. Yang *pertama* adalah *liberal klasik* atau *early liberalism* yang kemudian menjadi liberal ekonomi yang menekankan pada kebebasan dalam usaha individu, dalam hak memiliki kekayaan, dalam kebijakan ekonomi dan kebebasan melakukan kontrak serta menentang sistem *welfare state*. Yang *kedua* adalah *liberal sosial*. Aliran ini menekankan peran negara yang lebih besar untuk membela hak-hak individu (dalam pengertian yang luas), seringkali dalam bentuk hukum anti-diskriminasi.

Selain kedua tren liberalisme diatas yang menekankan pada hak-hak ekonomi dan politik dan sosial terdapat liberalisme dalam bidang pemikiran termasuk pemikiran keagamaan. Liberal dalam konteks kebebasan intelektual berarti independen secara intelektual, berfikiran luas, terus terang, dan terbuka. Kebebasan intelektual adalah aspek yang paling mendasar dari liberalisme sosial dan politik atau dapat pula disebut sisi lain dari liberalisme sosial dan politik. Kelahiran dan perkembangannya di Barat terjadi pada akhir abad ke 18, namun akar-akarnya dapat dilacak seabad sebelumnya (abad ke 17). Di saat itu dunia Barat terobsesi untuk membebaskan diri mereka dalam bidang intelektual, keagamaan, politik dan ekonomi dari tatanan moral, supernatural dan bahkan Tuhan.

Pada saat terjadi Revolusi Perancis tahun (1789) kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika, kepercayaan, berbicara, pers dan politik sudah dicanangkan. Prinsip-prinsip Revolusi Perancis itu bahkan dianggap sebagai *Magna Charta* liberalisme. Konsekuensinya adalah penghapusan Hak-hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan; penyingkiran agama dari kehidupan publik dan

menjadinya bersifat individual. Selain itu agama Kristen dan Gereja harus dihindarkan agar tidak menjadi lembaga hukum ataupun sosial. Ciri liberalisme pemikiran dan keagamaan yang paling menonjol adalah pengingkaran terhadap semua otoritas yang sesungguhnya, sebab otoritas dalam pandangan liberal menunjukkan adanya kekuatan diluar dan diatas manusia yang mengikatnya secara moral. Ini sejalan dengan doktrin nihilisme yang merupakan ciri khas pandangan hidup Barat postmodern yang telah disebutkan diatas.

Gagasan liberalisme berakar pada tradisi pemikiran liberal yang menempatkan individualisme, rasionalitas, kebebasan, dan equality sebagai nilai-nilai yang paling mendasar.

Beberapa asumsi Dasar dari faham Liberalisme dikemukakan oleh <sup>37</sup>adalah Individualisme: manusia sebagai individu merupakan hal yang paling mendasar dalam pandangan kaum liberal. Karena hakekat manusia merupakan makhluk yang penuh damai dan mempunyai kemauan bekerja sama, kompetitif secara konstruktif, dan rasional.

Equality: setiap individu lahir setara. Namun setiap individu mempunyai kemampuan dan kemauan yang berbeda-beda. Karenanya kaum liberal percaya akan adanya 'equality of opportunity' yang memberikan setiap individu kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi mereka masing-masing.

Kebebasan: kebebasan individu untuk mencapai apa yang terbaik bagi dirinya perlu mendapat jaminan. Kebebasan individu tersebut dijamin melalui mekanisme pasar [*invisible hand-Adam Smith*]

Peran negara minimalis: peran negara yang kuat dan aktif dapat mengancam kebebasan individu karenanya campur tangan negara dalam pasar akan merugikan masyarakat. Kaum Liberal memandang ketegangan laten antara negara dan pasar merupakan konflik antara penindasan dan kebebasan, kekuasaan dan hak individu, dogma otokratik dan logika rasional.<sup>38</sup>

Tradisi liberal bisa ditelusuri dari pemikiran Adam Smith (1723 – 90) ketika ia menerbitkan bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* pada tahun 1776. Kelahiran gagasan liberalisme Adam Smith tersebut muncul sebagai respon terhadap praktek-praktek merkantilisme di Inggris pada masa itu yang dicirikan dengan kentalnya peran negara. Praktek semacam ini dalam pandangan Adam Smith dianggap hanya menguntungkan segelintir kelompok tertentu dan telah membawa kesengsaraan bagi sebagian besar masyarakat. Tradisi liberal berangkat dari pemahaman bahwa kebebasan individu adalah hal yang paling mendasar dan kekuasaan negara yang berlebihan akan mempunyai potensi merusak tatanan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi pemikiran liberal pada hakekatnya tidak berarti pemikiran yang anti terhadap negara. Tradisi pemikiran liberal sekedar memagari kekuasaan negara yang cenderung mempunyai potensi merusak. Meskipun tidak serta merta dapat dimaknai sebagai gagasan yang anti negara, liberalisme klasik ala Adam Smith ini percaya pada peran negara yang minimalis. Tradisi liberal yang berangkat dari tradisi Adam Smith ini kemudian diberi label 'liberalisme klasik'.

Dalam pandangan liberalisme klasik, negara dianggap – meminjam istilah Tom Paine – sebagai '*necessary evil*' (Heywood, 2002). Negara dianggap sebagai '*necessary*' karena negara dibutuhkan untuk membentuk tatanan, menjaga keamanan, dan menjamin tegaknya aturan hukum. Sementara pada saat yang bersamaan, negara juga dapat muncul sebagai '*evil*' mengingat negara bisa memaksakan kehendak kolektif

yang dapat membatasi kebebasan individu. Karenanya, negara yang dibutuhkan adalah negara yang minimal, sekedar merupakan penjaga malam (*nightwatchman state*).

Pemahaman atas peran negara minimalis ini kemudian mengalami perkembangan dan memunculkan varian yang berbeda dalam tradisi pemikiran liberal. Kemunculan tokoh-tokoh seperti John Stuart Mill (1806 - 73) dan John Maynard Keynes (1883 - 1946) yang menghendaki peran negara yang lebih aktif menandai perubahan yang cukup mendasar dalam tradisi pemikiran liberal. Meskipun Mill dan Keynes menyepakati pentingnya kebebasan individu yang merupakan inti dari ajaran liberalisme namun keduanya mengambil posisi yang berbeda dengan liberalisme klasik terutama dalam menyikapi prinsip *self-regulating market*.

Mill melalui *Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy* (1848) telah meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan gagasan welfare liberalism. Dalam pandangan Mill, liberalisme yang telah melemahkan wewenang kekuasaan negara dan memperkuat kebebasan individu memang bisa dipandang sebagai sebuah capaian yang berarti. Namun bagi Mill kemajuan sosial perlu dipahami sebagai kemajuan moral dan spiritual dan bukan hanya penumpukan kekayaan (Balaam dan Veseth, 2005). Oleh karena itu, negara perlu melakukan tindakan terbatas dan selektif untuk mengoreksi kegagalan dan kelemahan pasar. Lebih jauh, meskipun negara harus “berlepas tangan” dalam sebagian besar bidang kehidupan namun negara perlu campur tangan dalam bidang pendidikan anak atau memberikan bantuan untuk orang miskin. Peran negara sangat diperlukan mengingat dalam kaca mata Mill, inisiatif individu tidak cukup memadai untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sementara itu Keynes melalui *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936) menolak asumsi dasar *self-regulating market* liberalisme klasik yang memisahkan peran negara dalam ekonomi. Lepasnya peran negara dalam urusan ekonomi menurutnya justru menimbulkan instabilitas dan tingginya tingkat pengangguran sebagaimana tercermin pada masa *Great Depression* tahun 1930an (Heywood, 2002). Keynes meyakini bahwa salah satu prasyarat agar kapitalisme dapat terus berkembang adalah *full employment* yang hanya akan dapat dicapai jika pemerintah dan bank sentral melakukan intervensi. Keynes karenanya percaya akan peran positif pemerintah dapat bermanfaat mengatasi persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pasar seperti inflasi dan pengangguran. Ajaran Keynes yang lebih dikenal sebagai *Keynesian Economics* ini mendominasi kebijakan ekonomi politik pasca perang dunia kedua di bawah sistem Bretton Woods hingga akhir 1970-an.

### C. Proses Liberalisasi Teologi mengatansamakan modernisasi

Di Barat yang mula-mula muncul adalah liberalisme intelektual yang mencoba untuk bebas dari agama dan dari Tuhan, namun dari situ lahir dan tumbuh liberalisme pemikiran keagamaan yang disebut juga *theological liberalism*. Perkembangan liberalisme pemikiran keagamaan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga fase perkembangan:

**Fase pertama** dari abad ke 17 yang dimotori oleh filosof Perancis Rene Descartes yang mempromosikan doktrin rasionalisme atau *Enlightenment* yang berakhir pada pertengahan abad ke 18. Doktrin utamanya adalah a) percaya pada akal manusia b) keutamaan individu c) imanensi Tuhan dan d) meliorisme (percaya bahwa manusia itu berkembang dan dapat dikembangkan).

**Fase kedua** bermula pada akhir abad ke 18 dengan doktrin Romantisisme yang menekankan pada individualisme, artinya individu dapat menjadi sumber nilai. Kesadaran-diri (*self-consciousness*) itu dalam pengertian *religious* dapat menjadi Kesadaran-Tuhan (*god-consciousness*). Tokohnya adalah Jean-Jacques, Immanuel Kant, dan Friedrich Schleiermacher dsb.

**Fase ketiga** bermula pada pertengahan abad ke 19 hingga abad ke 20 ditandai dengan semangat modernisme dan postmodernisme yang menekankan pada ide tentang perkembangan (*notion of progress*). Agama kemudian diletakkan sebagai sesuatu yang berkembang progressif dan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan modern serta di harapkan dapat merespon isu-isu yang diangkat oleh kultur modern. Itulah sebabnya maka kajian mengenai doktrin-doktrin Kristen kemudian berubah bentuk menjadi kajian psikologis pengalaman keagamaan (*psychological study of religious experience*), kajian sosiologis lembaga-lembaga dan tradisi keagamaan (*sociological study of religious institution*), kajian filosofis tentang pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan (*philosophical inquiry into religious knowledge and values*).

Sementara itu pada abad ke 19 liberalisme dalam pemikiran keagamaan Katholik Roma berbentuk gerakan yang mendukung demokrasi politik dan reformasi gereja, namun secara teologis tetap mempertahankan ortodoksi. Sedangkan dalam pemikiran Kristen Protestan liberalisme merupakan tren kebebasan intelektual yang menekankan pada substansi etis dan kemanusiaan Kristen dan mengurangi penekanan pada teologi yang dogmatis. Artinya dengan masuknya paham liberalisme kedalam pemikiran keagamaan maka banyak konsep dasar dalam agama Kristen yang berubah.

Liberalisasi dalam agama-agama samawi telah dilakukan melalui beberapa etape seperti liberalisasi Agama Yahudi, hal ini telah lama mengalami liberalisasi, sehingga saat ini Liberal Judaism (Yahudi Liberal) secara resmi masuk dalam salah satu aliran dalam agama Yahudi. Perkembangan liberalisasi dalam agama Kristen juga sangat jauh. Bahkan, agama Kristen bisa dikatakan sebagai salah satu "korban" liberalisasi dari peradaban Barat.

Agama Kristen mulai bersinar di Eropa ketika pada tahun 313, Kaisar Konstantin mengeluarkan surat perintah (Edik) yang isinya memberi kebebasan warga Romawi untuk memeluk agama Kristen. Tahun 380 Kristen dijadikan sebagai agama negara oleh Kaisar Theodosius. Menurut Edik Theodosius, semua warga negara Romawi diwajibkan menjadi anggota gereja Katolik. Agama-agama di luar itu dilarang. Bahkan, sekte-sekte Kristen di luar "gereja resmi" pun dilarang. Dengan berbagai keistimewaan yang dinikmatinya, Kristen kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia.

Akan tetapi, Kristen terjerumus arus yang tak dapat dihindarnya, yaitu sekularisasi dan liberalisasi. Jika dicermati lebih jauh, perkembangan gereja-gereja di Eropa kini sudah memprihatinkan. Seorang aktivis Kristen asal Bandung memaparkan dengan jelas kehancuran gereja-gereja di Eropa dalam bukunya yang berjudul *Gereja Modern, Mau ke Mana?* (1995). Kristen benar-benar kelabakan dihantam nilai-nilai sekularisme, modernisme, liberalisme, dan 'klenikisme'.

Di Amsterdam, misalnya, 200 tahun lalu 99% penduduknya beragama Kristen. Kini tinggal 10% saja yang dibaptis dan ke gereja. Mayoritas dmereka sudah sekuler. Di Perancis yang 95% penduduknya tercatat beragama Katolik, hanya 13%-nya saja yang menghadiri kebaktian di gereja seminggu sekali. Di Jerman pada tahun 1987, menurut laporan *institute for Public Opinian Research*, 46 persen penduduknya

mengatakan bahwa agama sudah tidak diperlukan lagi. Di Finlandia, yang 97% Kristen, hanya 3% yang pergi ke gereja tiap minggu. Di Norwegia, yang 90% Kristen, hanya setengahnya saja yang percaya pada dasar-dasar kepercayaan Kristen. Juga, hanya sekitar 3% yang rutin ke gereja tiap minggu.

Masyarakat Kristen Eropa juga tergila-gila pada paranormal, mengalahkan kepercayaan mereka pada pendeta atau imam Katolik. Di Jerman Barat--sebelum bersatu dengan Jerman Timur--terdapat 30.000 pendeta. Tetapi, jumlah paranormal (witchcraft) mencapai 90.000 orang. Di Perancis terdapat 26.000 imam Katolik, tetapi jumlah peramal bintang (astrolog) yang terdaftar mencapai 40.000 orang.

Di sejumlah gereja, arus liberalisasi mulai melanda. Misalnya, gereja mulai menerima praktik-praktik homoseksualitas. Eric James, seorang pejabat gereja Inggris, dalam bukunya berjudul *Homosexuality and a Pastoral Church*, mengimbau agar gereja memberikan toleransi pada kehidupan homoseksual dan mengizinkan perkawinan homoseksual antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

Sejumlah negara Barat telah melakukan "revolusi jingga", karena secara resmi telah mengesahkan perkawinan sejenis. Di berbagai negara Barat, praktik homoseksual bukanlah dianggap sebagai kejahatan, begitu juga praktik-praktik perzinahan, minuman keras, pornografi, dan sebagainya. Barat tidak mengenal sistem dan standar nilai (baik-buruk) yang pasti. Semua serba relatif: diserahkan kepada "kesepakatan" dan "kepantasan" umum yang berlaku.

Maka, orang berzina, menenggak alkohol, mempertontonkan aurat, dan sejenisnya bukanlah dipandang sebagai suatu kejahatan, kecuali jika masyarakat menganggapnya jahat. Homoseksual dianggap baik dan disahkan oleh negara. Bahkan, para pastor gereja Anglikan di New Hampshire AS telah sepakat mengangkat seorang uskup homoseks bernama Gene Robinson pada November 2003. Kaum Kristen yang homo itu merombak ajaran Kristen, terutama mengubah tafsir lama yang masih melarang tindakan homoseksual.

Kini setelah 30 tahun berlangsung, arus sekularisasi dan liberalisasi itu semakin sulit dikendalikan, dan berjalan semakin liar. Arus itu merambah ke berbagai sisi kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan bahkan pemikiran keagamaan. Penyebaran paham "pluralisme agama", "dekonstruksi agama", "dekonstruksi kitab suci", dan sebagainya kini justru berpusat di kampus-kampus dan organisasi-organisasi Islam--sebuah fenomena yang 'khas Indonesia'. Paham-paham ini menusuk jantung Islam dan berusaha merobohkan Islam dari pondasinya yang paling dasar.

Dalam perkembangannya secara semiotika ciri pemikiran liberal sbb:

**Pertama**, Percaya pada Tuhan, tapi bukan Tuhan dalam kepercayaan Kristen Orthodox. **Kedua**, Memisahkan antara doktrin Kristen dan etika Kristen. Inilah yang membawa kelompok liberal untuk berkesimpulan bahwa orang atheist sekalipun dapat menjadi moralis.

**Ketiga**, Tidak percaya pada doktrine Kristen Orthodox, seperti doktrin-doktrin Trinitas, ketuhanan Yesus, perawan yang melahirkan, Bible sebagai kata-kata Tuhan secara literal, takdir, neraka, setan dan penciptaan dari tiada (*creatio ex nihilo*). Doktrin satu-satunya yang mereka percaya, selain percaya akan adanya Tuhan adalah keabadian jiwa.

**Keempat**, Menerima secara mutlak pemisahan agama dan negara. Para pendiri negara Amerika menyadari akibat dari pemerintahan negara-negara Eropah

yang memaksakan doktrin suatu agama dan menekan agama lain. Maka dari itu kata-kata "Tuhan" dan "Kristen" tidak terdapat dalam undang-undang. Ini tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh agama liberal dalam konvensi konstitusi tahun 1787.

**Kelima,** Percaya penuh pada kebebasan dan toleransi beragama. Pada mulanya toleransi dibatasi hanya pada sekte-sekte dalam Kristen, namun toleransi dan kebebasan penuh bagi kaum atheis dan pemeluk agama non-Kristen hanya terjadi pada masa Benyamin Franklin, Jefferson dan Madison. Kebebasan beragama sepenuhnya berarti bukan hanya kebebasan dalam beragama tapi bebas dari agama juga, artinya bebas beragama dan bebas untuk tidak beragama.<sup>39</sup>

Dalam liberalisme pemikiran keagamaan masalah yang pertama kali dipersoalkan adalah konsep Tuhan (teologi) kemudian doktrin atau dogma agama. Setelah itu mempersoalkan dan kemudian memisahkan hubungan agama dan politik (sekularisme). Akhirnya liberalisme pemikiran keagamaan menjadi berarti sekularisme dan dipicu oleh gelombang pemikiran postmodernisme yang menjunjung tinggi pluralisme, persamaan (*equality*), dan relativisme. Kini paham liberalisme ini sedang diekspor ke dunia Islam, khususnya Indonesia.

Aliran-aliran liberalisme yang mengatasnamakan modernisasi pemikiran telah berkembang mulai dari Barat dengan wajah yang beragam disertai dengan aliran yang berbeda.

Perbedaan pendapat ini selalunya membawa kepada perdebatan yang hebat dan garang di antara ahli-ahli liberal. Daripada perpecahan ini dari sudut liberalisme klasik, wujud beberapa pergerakan di dalam liberalisme. Seperti di dalam banyak perdebatan, kumpulan-kumpulan yang bertentangan menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza untuk menyatakan kepercayaan-kepercayaan yang sama dan kadang-kala, mereka menggunakan perkataan-perkataan yang sama untuk menerangkan perkara-perkara yang berbeza. Di dalam artikel ini, "liberalisme politik" akan digunakan untuk sokongan terhadap demokrasi liberal yang menentang raja yang berkuasa atau diktator. Liberalisme budaya untuk sokongan terhadap kebebasan peribadi yang menentang undang-undang yang mengongkong kebebasan di atas dasar nasionalisme atau agama; "liberalisme ekonomik" untuk sokongan terhadap harta peribadi and menentang peraturan-peraturan yang mengekang hak-hak terhadap harta peribadi yang ditulis oleh kerajaan; dan "liberalisme sosial" di mana ia menunjukkan sokongan terhadap kesaksamaan and menentang ketidak samarataan peluang. Bagi "liberalisme modern" pula bermaksud campuran bentuk-bentuk liberalisme yang tercatat sebelum ini yang boleh ditemui di negara-negara maju sekarang.

Terdapat beberap prinsip liberalisme yang telah dipersetujui di kalangan liberal:

**Liberalisme politik** adalah aliran di mana seseorang itu adalah asas undang-undang dan masyarakat. Tambahan lagi, masyarakat dan institusi-institusi kerajaan yang wujud di dalam masyarakat berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak peribadi tanpa memilih kasih kepada sesiapa yang mempunyai taraf sosial yang tinggi. Magna Carta adalah satu contoh di mana dokumen politik meletakkan hak-hak peribadi lebih tinggi daripada kuasa raja. Liberalisme politik menekankan perjanjian sosial yang

mana rakyat merangka undang-undang and bersetuju untuk mematuhi undang-undang tersebut. Ini adalah berdasarkan pemikiran di mana seseorang itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. Liberalisme politik mengandungi semua lapisan masyarakat tanpa mengira jantina, kaum atau taraf ekonomi. Liberalisme politik juga menekankan kedaulatan undang-undang dan demokrasi liberal.

**Liberalisme budaya** menekankan hak-hak peribadi yang berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati termasuk kebebasan seksual, kebebasan beragama dan kebebasan pemahaman dan perlindungan dari campur tangan kerajaan di dalam kehidupan pribadi. John Stuart Mill menyatakan dengan tepat di dalam esainya yang bertajuk *On Liberty*:

#### D. Kesimpulan

Gerakan modernisasi pemikiran Islam di Indonesia telah berkembang secara evolusif sejak permulaan abad XX, ditandai oleh munculnya beberapa tokoh (KH. Ahmad Dahlan, KH. Jamil Djambek, Hamka, H. Abdullah Ahmad dan lain-lain), yang merupakan pengaruh modernisasi Ibnu Taimiyah, Muh. Bin Abdul Wahab, Jamaluddin al-Afgani, selanjutnya Muhammad Abduh di Timur Tengah.

Proses modernisasi pemikiran Islam itu, telah berkembang secara dinamis dan juga mempengaruhi munculnya para modernis Islam di permukaan yang lebih brilliant, yang menginginkan agar umat Islam menginterpretasikan Islam sedapat mungkin secara rasional dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek teologi, filsafat dan tasawuf.

Gerakan modernisasi pemikiran Islam ini dilakukan oleh beberapa tokoh antara lain: Muh. Natsir, HOS Tjokroaminoto, Agussalim, Deliar Noer dan dua tokoh yang merupakan tokoh dalam kajian ini yaitu Harun Nasution dan Nurcholish Madjid.

Harun dan Nurcholish merupakan dua tokoh modernis yang memiliki tipologi pemikiran sama, antara lain dalam persoalan rasionalisme, Islam dan kebangsaan, pendidikan, sekularisme dan pluralisme. Meskipun terdapat perbedaan, namun tidak terlalu jauh. Dalam hal ini letak perbedaannya hanyalah dari penjelasannya Harun, dalam membahas masalah politik dan demokratisasi misalnya belum mendetail, sedangkan Nurcholish Madjid dalam menjelaskannya tentang aspek itu, komprehensif dan sangat radikal. Juga, Harun lebih cenderung kepada persoalan sosial teologis, sedangkan Nurcholish lebih cenderung kepada sosial demokrasi dan politik.

#### Endnotes

---

<sup>1</sup>Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Negara: Studi tentang Percaturan dan Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 66.

<sup>2</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992), h. 17.

<sup>3</sup>Lihat Mohammed Arkuon, *Al-Islam al-Muasir* dalam Qiraah, h. 49.

<sup>4</sup>Pandangan atau pun metode baru, khusus mengenai kecenderungan mengenai masalah kepercayaan keagamaan untuk menundukkan tradisi dalam upaya

---

penyelarasan dengan pemikiran baru, lihat, *Concise Oxford Dictionary* edisi 1951 h. 541 dalam Joesef Sou'yb, *Perkembangan Theologi Modern* (Medan:Rimbow, 1987), h. 51.

<sup>5</sup>Akibatnya adalah gangguan sosial dalam kehidupan tradisional dan kegagalan membangun institusi negara modern yang efektif bagi tradisionalisme memandang sebagai "proyek Barat", lihat Akbar S. Ahmed, *Postmodernism and Islam; Predicament and Promise* diterjemahkan dengan judul *Posmodernisme: Bahasa dan Harapan bagi Islam* (Bandung: Mizan, 1992), h. 47-48.

<sup>6</sup>*Ibid.* h. 46.

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 43. Bandingkan Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1* (Yogyakarta: Tridakarya, 1986). *Loc.cit.*

<sup>8</sup>Lihat Sayyed Hosein Nasr, *Traditional Islam In Modern World*, diterjemahkan Lukman Hakim dengan judul *Islam dan Tradisi di tengah Kancah Dunia Modern* (Bandung: Pustaka, 1994), h. 98-108.

<sup>9</sup>Mohammed Arkoun, *op. cit.* h. 41 dalam Suadi Saputro, h. 56.

<sup>10</sup>Pendidikan yang dimaksud adalah sains modern yang dikembangkan sejak gagasan-gagasan masa renaissance (bidang astronomi) – pionernya Nicolas Copernicus /1473-1543 sampai saintisme modern Barat yang mengandalkan manusia sebagai pusat (antroposentris) seperti sains modern Barat yang Emperistis, Rasionalistis, Positivis dan Materialistis.

<sup>11</sup>Lihat Ahmad As-Shouwy et all, *Mukjizat Alquran dan As-Sunah Tentang IPTEK* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 22-23.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Fazlur Rahman, *Islam Challenges and opprotunities* dalam A.T Weleh dan P. Cachia (ed) *Islam Patt Influence and present challenge* (Edinburg : Ediburh University Pres,, 1979) h. 315 dalam Ahmad Amir Azis, *Neo-Modernisme Islam dari Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), h. 16.

<sup>14</sup>Akbar S. Ahmad, *Op.cit.* h. 45.

<sup>15</sup>Kepiawaian para Cendekiawan yang pemikirannya sangat brilian itu karena mereka mengangkat Tema-tema yang cukup filosofis dan bernuasa sosial dan mendapat respon positif. Para modernis itu, menghendaki adanya perubahan reinterpretasi keagamaan yang berwajah demokratis pluralistis dan toleransif, karena pola atau gaya lama yang klasik dalam pemikiran sebagian besar umat Islam tidak dapat mengantarkan pada pemahaman keagamaan yang demokratis, lihat, Breg barton, *The International Context of the Emergence of Islamic Neo-Modernisme in Indonesia* dalam Ahmad Amir Azis *loc. cit.*

<sup>16</sup>Budi Munawar Rachman, *Dari Tahapan Moral ke Periode sejarah : Pemikiran Neo-Modernisme Islam Indonesia*, dalam *Ulumul Qur'an*, no 3 vol VI tahun 1995), h 4-27 .

<sup>17</sup>Neo-modernis dapat diartikan secara sederhana dengan paham-paham modernisme baru. Neo-modernisme ini dapat dipergunakan untuk memberi identitas pada kecederungan modernisme pemikiran keislaman yang muncul sejak beberapa

---

dekade terakhir ini yang merupakan sinbuku, setidaknya upaya sinbuku dari pola pun tradisionalisme (tesa).

<sup>18</sup>R. William Liddle, *Polite and Culture In Indonesia* (University of Michigan, 1988), h. 11-14. Dalam Kompas 20 September 2000.

<sup>19</sup>Nurcholish Madjid, *Cendikiawan dan Religiusitas masyarakat; Kolom-kolom di Tabloit Tekad*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 63.

<sup>20</sup>Dalam pengertian saya, yang termasuk kalangan yang terakhir itu ialah seorang yang punya riwayat erat dengan gerakan sosial politik dan pendidikan Islam, dengan pemikiran yang dinyatakan sebagai seorang Islam, Lihat Ridwan Saidi: *Dinamika Kepemimpinan Islam dalam era Orde Baru atau Tempo*, No. 49, 2 Februari 1985 dalam Amin Rais, *Islam Di Indonesia : Suatu Ikhtiar Mengaca Diri* (Jakarta : Rajawali.Pers, 1992) h. 156-157.

<sup>21</sup>*Ibid* h. 158.

<sup>22</sup>Panji Masyarakat, No 455, 11 Januari 1985.

<sup>23</sup>Lihat, Azyumardi Azra, *Neo Modernisme, Cak Nur* dalam Tempo, edisi 3 April 1993.

<sup>24</sup>Nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir di Maninjau Sumatera Barat 16 Februari 1908, tokoh pelopor gerakan “kaum muda” dari Mingkabau, ia seorang novelis politikus, sejarawan, sastrawan. Ahli tasawuf. Lihat, *Ensiklopedia Islam* (Cetakan::Jakarata. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1993 h 75. bandingkan Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta : Pustaka Panji Masyarakat, 1991) h. XVII-XIX.

<sup>25</sup>Ahmad Dahlan, nama kecilnya Muhammad Darwisy lahir tahun 1868 pendiri organisasi Muhammadiyah 18 Nopember 1912 M. Modernis di bidang agama pendidikan dan pengajaran socio kemasyarakatan, lihat Muhammad Yusron Asrafe, *KH Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepeimpinannya* (Yogyakarta : Yogyakarta Terbit, 1980), h. 21.

<sup>26</sup>Muhammad Natsir (Datuk Ginaro Panjang ) lahir di Jembatan berukir alam panjang Kabupaten Solok Sumatera Barat 17 Juli 1908, modernis di bidang Dakwah baik ditinjau dari aspek politik ekonomi, hukum dan pendidikan agama lihat, Yusuf Abdullah Puar, *Muhammad Natsir 70 Tahun Kerangka Kehidupan di Perjuangannya*. (Cetakan : 1: Jakarta : Darul Falah. 1999), h. 4.

<sup>26</sup>Deliar Noer *op. cit.* h. 92.

<sup>28</sup>Alfian, *Pemikiran dan Perubahan politik Indonesia 1992*, h. 9.

<sup>29</sup>Hajrianto Y Thohari, *Daur Ulang Politik Islam* dalam Abdurahman Wahid et all *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), h. 128.

<sup>30</sup>Lihat Baktiar Efendi, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1998), h. 176.

---

<sup>31</sup>Didiet Budi Adiputro,  
TTP/AKADEMIMERDEKA.ORG/2010/03/03/[Liberalisme-  
Mendasarkan-Nilai-  
Nilainya Pada Kodrat Manusia](#) 26-28 Februari 2010

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Pada tahun 1999 Greg Barton menulis disertasinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Paramadina dengan judul *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (1999: xxi).

<sup>34</sup>Simon Blackburn, *Oxford Dictionary of Philosophy* dalam Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisme dari Idologi menjadi Teologi*

<sup>35</sup> Coady, C. A. J. *Distributive Justice*

<sup>36</sup> Brinkley, Alan. *Liberalism and Its Discontents*.

<sup>37</sup> Mohtar Mas' oed. *Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-liberal*. Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM. Yogyakarta (2002).

<sup>38</sup>Lihat, Heywood, 2002 dan Mohtar Mas' oed, "*Liberalisme dalam Ekonomi Politik Internasional*". Bahan Kuliah Ekonomi Politik Internasional, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM. Yogyakarta (1998).

<sup>39</sup> Ciri tersebut dikemukakan oleh Nicholas F. Gier, dari University of Idaho, Moscow.